

RINGKASAN

Penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap Pekerja anak di Indonesia masih menjadi masalah serius meskipun telah ada kerangka hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, karena celah hukum, lemahnya pengawasan, dan tekanan ekonomi keluarga membuat praktik ini terus berlangsung, termasuk di Kabupaten Banyumas yang mencatat laporan pekerja anak pada di berbagai sektor informal, sehinggamenimbulkan pertanyaan apakah pemerintah daerah hadir untuk mengkaji tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pekerja anak di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku mengenai pekerja anak. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data Sekunder.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Tanggung Jawab, Perlindungan Anak,Pekerja.

SUMMARY

This study examines the legal protection of child workers in Indonesia, which remains a serious issue despite the existence of a legal framework established through Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 on Manpower and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Legal loopholes, weak law enforcement, and the economic pressures faced by families continue to contribute to the persistence of child labor practices, including in Banyumas Regency, where cases of child workers have been reported across various informal sectors. This situation raises the question of whether the local government has fulfilled its responsibility to provide legal protection and ensure the fulfillment of the rights of child workers in Banyumas Regency. The purpose of this study is to analyze the applicable legal provisions concerning child workers. This research employs a normative juridical research method and relies on secondary data as its primary source of information.

Keywords: *Local Government, Responsibility, Child Protection, Child Workers.*